



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun

www.bapenda.malangkota.go.id | email : bppd@malangkota.go.id

Malang 65132



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Kota Malang
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang
Tanggal : 30 JUL 2025
Nomor : 700.1.2.7/1647/35.73.504/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Triwulan II TA.2025

Berdasarkan Surat Undangan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tanggal 10 Juli 2025 Nomor: 900.1.13.1/1431/35.73.504/2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan PAD Triwulan II TA.2025 pada hari Rabu, 16 Juli 2025 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Triwulan II Tahun 2025:

1. BAPENDA

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
PBJT JASA PERHOTELAN	56.000.000.000,00	25.740.960.096,00	40%	45,97%
PBJT - Hotel	53.385.000.000,00	23.728.194.520,00	40%	44,45%
PBJT - Wisma Pariwisata	472.500.000,00	127.057.078,00	40%	26,89%
PBJT - Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2.142.500.000,00	1.885.708.498,00	40%	88,01%
PBJT JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	163.404.476.287,00	88.820.215.690,00	40%	54,36%
PBJT - Restoran	151.239.476.287,00	88.207.106.588,00	40%	58,32%
PBJT - Penyedia Jasa Boga dan Katering	12.165.000.000,00	613.109.102,00	40%	5,04%
PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	10.000.000.000,00	5.891.529.984,80	40%	58,92%
PBJT - Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung	3.576.500.000,00	2.696.534.624,90	40%	75,40%
PBJT - Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.809.000.000,00	234.768.341,00	40%	12,98%
PBJT - Pameran	760.500.000,00	500.000,00	40%	0,07%
PBJT - Permainan Ketangkasan	618.000.000,00	1.352.307.761,90	40%	218,82%

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
PBJT - Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan KebugaranTempat/ Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan	288.000.000,00	523.111.712,00	50%	181,64%
PBJT - Panti Pijat dan Pijat Refleksi	1.411.500.000,00	401.594.992,00	50%	28,45%
PBJT - Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa	1.536.500.000,00	682.732.553,00	50%	44,43%
Pajak Reklame	24.000.000.000,00	16.982.731.745,00	50%	70,76%
Pajak Reklame Papan	22.740.000.000,00	15.765.355.910,00	50%	69,33%
Pajak Reklame Kain	1.155.000.000,00	1.100.107.515,00	50%	95,25%
Stiker	1.575.000,00	-	50%	0,00%
Selebaran	1.050.000,00	19.200.000,00	50%	1828,57%
Reklame Berjalan/Mobil	102.375.000,00	98.068.320,00	50%	95,79%
PBJT TENAGA LISTRIK	108.060.000.000,00	55.088.644.029,59	45%	50,98%
PBJT - Konsumsi Tenaga Listrik Dari Sumber lain	107.610.000.000,00	54.884.530.316,00	45%	51,00%
PBJT - Konsumsi Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri	450.000.000,00	204.113.713,59	45%	45,36%
Pajak Parkir	4.000.000.000,00	3.277.316.950,00	45%	81,93%
Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00	1.682.895.456,70	30%	48,08%
PBB Perkotaan	73.000.000.000,00	33.250.957.140,00	35%	45,55%
BPHTB	220.000.000.000,00	92.956.170.827,72	40%	42,25%
Opsen PKB	126.293.996.903,00	59.853.623.750,00	40%	47,39%
Opsen BBNKB	57.801.526.810,00	26.496.605.900,00	40%	45,84%
TOTAL	846.060.000.000,00	410.041.651.567,91		48,46%

2. DINAS KESEHATAN

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Pelayanan Kesehatan	434.018.750,00	159.000.000,00	45%	36,63%

3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	21.000.000.000,00	12.542.007.000,00	50%	59,72%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00	10.000.000,00	50%	83,33%
TOTAL	21.012.000.000,00	12.552.007.000,00	50%	59,74%

4. DINAS PERHUBUNGAN

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	17.000.000.000,00	2.772.908.351,00	35%	16,31%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.500.000.000,00	2.598.351.683,00	35%	39,97%
TOTAL	23.500.000.000,00	5.371.260.034,00	35%	22,86%

5. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Pelayanan Pasar	9.000.000.000,00	3.865.311.000,00	40%	42,95%
Retribusi Pelataran	2.160.000.000,00	841.217.000,00	40%	38,95%
Retribusi Los	3.690.000.000,00	1.652.641.000,00	40%	44,79%
Retribusi Klos	3.150.000.000,00	1.371.453.000,00	40%	43,54%
TOTAL	9.000.000.000,00	3.865.311.000,00	40%	42,95%

6. DINAS PUPR PERKIM

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Pemakaian Alat	75.000.000,00	25.525.000,00	28%	34,03%
Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00	8.750.000,00	0%	35,00%
TOTAL	100.000.000,00	34.275.000,00		34,28%

7. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Penyewaan Tanah	1.500.000.000,00	1.085.731.525,00	50%	72,38%
Lain-Lain PAD yang Sah				
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.000.000.000,00	1.065.808.000,00		106,58%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	19.450.000.000,00	14.259.317.366,00		73,31%
Hasil dari Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur		1.280.039.990,00		
Penerimaan Jasa Giro	4.000.000.000,00	1.130.113.217,07		28,25%
Pendapatan Bunga	-	-		0,00%
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		3.150.000,00		
Pendapatan denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-		
Pendapatan Denda Pajak Daerah		1.795.240.753,96		
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		169.056.142,65		
Pendapatan dari Pengembalian	-	14.202.601.721,10		
Pendapatan BLUD	59.170.739.023,00	25.655.008.367,38		43,36%
Pendapatan BLUD dari LLPADS	152.100.977,00	54.978.156,98		36,15%
JUMLAH	83.772.840.000,00	59.615.313.715,14		71,16%

8. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.000.000.000,00	442.309.000,00	40%	44,23%

9. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	52.500.000,00	32.867.400,00	40%	62,60%

10. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Penyewaan Bangunan	50.000.000,00	64.000.000,00	25%	128,00%

11. DISNAKER PMPTSP

JENIS	TARGET	REALISASI	% TARGET	% REALISASI
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	15.000.000.000,00	3.031.017.997,00	25%	20,21%
Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)	1.000.000.000,00	292.603.000,00	25%	29,26%
Total	16.000.000.000,00	3.323.620.997,00		20,77%

Berikut kami sampaikan pula Laporan Perbandingan Piutang per 31 Maret 2025 dan 30 Juni 2025:

NO	OPD	PIUTANG PER 31 MARET 2025(Rp)	PIUTANG PER 30 JUNI 2025(Rp)
1	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan		
	Retribusi Tempat Berjualan	3.255.581.000,00	3.248.511.000,00
2	Dinas Perhubungan		
	Retribusi Terminal MCK	37.041.200,00	37.041.200,00
	Retribusi Terminal Kios	1.550.800,00	1.550.800,00
3	Dinas Lingkungan Hidup		
	Retribusi Pelayanan Persampahan	162.247.000,00	161.995.500,00
4	Pajak Daerah	309.888.611.096,69	305.308.601.303,75
	PBJT Jasa Perhotelan	3.701.969.560,75	3.219.292.730,75
	PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman	12.520.753.129,78	11.841.477.182,78
	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	856.608.240,52	465.525.744,52
	PBJT Jasa Parkir	1.611.006.222,50	602.280.982,50
	PBJT Tenaga Listrik (Non PLN)	82.013.387,22	33.795.546,24
	Pajak Air Tanah	1.466.697.038,92	1.715.593.502,96
	PBB	289.649.563.517,00	287.430.635.614,00

Dari Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Triwulan II Tahun Anggaran 2025 disampaikan pula kendala-kendala yang dihadapi oleh beberapa perangkat daerah pemungut Retribusi yaitu:

No	Nama PD	Permasalahan	Langkah Kerja
1	Diskoperindag	Tidak ada kendala.	
2	Dinas Kesehatan	a. Pelanggan Labkesda belum ada peningkatan yang signifikan. b. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan laboratorium masih terbatas. c. Keterbatasan sarana untuk peningkatan layanan laboratorium baik lingkungan maupun klinik.	a. Update promosi tentang pelayanan di UPT Labkesda melalui instagram. b. Pengajuan tambahan anggaran. c. Pengajuan alat laboratorium lewat program Impuls (Indonesia Public Healty Laboratory System Strengthening) dari Kementerian Kesehatan RI.
3	Disporapar	Tidak ada kendala	
4	BKAD	PPKD a. Masih terdapat SKPD yang melakukan penginputan pendapatan SIPD RI berbeda dengan setoran yang masuk ke RKUD. b. Masih terdapat pendapatan yang sulit diidentifikasi.	PPKD a. Proses rekonsiliasi agar dilakukan pengecekan dengan Rekening Koran. b. Koordinasi dengan Bank Jatim dan SKPD.

		RETRIBUSI a. Turunnya perubahan atas Perda sebelumnya sehingga banyak WR yang belum mengetahui. b. Keterbatasan tenaga penyampaian taguhan/pemberitahuan retribusi. c. Belum ada data NJOP Baru.	RETRIBUSI a. Pemberitahuan pembayaran retribusi masih bergantung/ menitipkan pada warga yang kenal dan pemberitahuan di kantor. b. Pembayaran retribusi masih bergantung pada WR yang membawa SPPT PBB.
5	DPUPR Perkim	a. Untuk Retribusi yang ada target yaitu pada pemakaian laboratorium dan alat berat tidak ada kendala. b. Untuk retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan retribusi pengolahan limbah cair, sesuai Perda No. 1 Tahun 2025 diharuskan untuk dilakukan pemungutan karena secara regulasi sudah diatur.	a. Telah melebihi target. b. Dilakukan pemungutan sesuai aturan karena Perda telah diundangkan dengan menggunakan SKRD/sesuai ketentuan. c. Mengusulkan target retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan retribusi pengolahan limbah cair pada PAK tahun 2025.
6	Dispangtan	Tidak ada kendala	Melakukan sosialisasi terus menerus untuk meningkatkan penerimaan retribusi.
7	Diknas	Tidak ada kendala	Nihil
8	Dishub	a. Belum adanya regulasi terkait imbal jasa dengan jukir untuk pembagian.	a. Masih berproses Ranperda Penyelenggaraan Parkir untuk dimasukkan imbal jasa pembagian.
9	Disnaker PMPTSP	a. Untuk retribusi PBG, WR tidak ada batas waktu untuk pembayaran retribusi. b. Retribusi TKA, terkendala kontrak kerja tenaga asing. Untuk kontrak dengan masa kontrak 1 tahun retribusi menjadi hak Provinsi, sedangkan untuk perpanjangan kontrak di atas 1 tahun retribusi masuk dalam Kas Daerah Kota Malang	a. Untuk retribusi PBG, kepada WR perlu diberikan batas waktu pembayarannya.
10	Satpol PP	a. Tidak ada kendala	a. Nihil
11	Dinas Lingkungan Hidup	a. Adanya reviu PKS antara DLH dengan Perumda Tugu Tirta sehingga menghambat pelaksanaan perpanjangan PKS tersebut, di mana masa berlaku PKS berakhir pada 1 Agustus 2025. Sehingga apabila tidak dilakukan perpanjangan terhadap PKS dimaksud, maka potensi PAD dari retribusi pelayanan kebersihan akan hilang sebesar 90%, karena potensi terbesar ada pada penerimaan retribusi yang dipungut oleh Tugu Tirta. b. Untuk proses kerja sama menunggu Keputusan dari pimpinan (KPM) dengan penerbitan Keputusan Penunjukan Pihak Ketiga.	a. Bapenda selaku koordinator, diharapkan dapat membantu untuk merekomendasikan kepada KPM/ Sekda Kota Malang untuk segera diterbitkan Keputusan Penunjukan Pihak Ketiga sebagai mitra DLH dalam pemungutan retribusi kebersihan kepada pelanggan dengan melihat kebijakan efisiensi dan efektivitasnya.

Dengan adanya kendala-kendala yang disampaikan oleh beberapa PD (dokumen terlampir), terkait capaian penerimaan PAD Triwulan I Tahun Anggaran 2025, berikut disampaikan pula pendapat dari beberapa instansi yang turut hadir dalam rapat Monitoring dan Evaluasi PAD Triwulan I Tahun Anggaran 2025:

• **Bapenda selaku Koordinator PAD**

1. Disampaikan bahwa dalam Perda No. 1 Tahun 2025 yang telah diundangkan pada 18 Juni 2025, masing-masing perangkat daerah pemungut retribusi perlu mencermati terkait potensi-potensi retribusi yang harus dipungut sebagai upaya peningkatan PAD Kota Malang. Dengan adanya potensi baru yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2025, diharapkan masing-masing perangkat daerah pemungut retribusi untuk menyesuaikan target dalam P-APBD 2025 ini.
2. Perlu dilakukan perubahan Perwal No. 8 Tahun 2024 terkait penerapan penetapan reklame, di mana salah satu contoh untuk kelas jalan di Ciliwung terbagi menjadi 2 kelas.
3. Penertiban atas reklame oleh Satpol PP, mohon untuk data dan hasil dari penertiban diberitahukan kepada Bapenda. Hal ini diperlukan terkait hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan bukti peninjauan lapangan terutama untuk reklame yang sudah habis masa berlakunya.
4. Terhadap dinas terkait, perihal fasum yang diserahkan/ dimanfaatkan (asset dari Pemkot maupun penyerahan dari pelaku usaha) hendaknya Bapenda diberikan datanya.
5. Bahwa data piutang seringkali mengalami perubahan ketika *cut off* data untuk piutang.
6. Terkait terjadinya *double* penetapan untuk *Official Assesment* yang dilakukan penghapusan/pembatalan, diharapkan bisa dilakukan secara otomatis dari system.
7. Dengan adanya diskon di awal tahun untuk pembayaran tagihan PLN, apakah hal ini berpengaruh pada penetapan target dari PLN yang awalnya 116 Miliar.
8. Disampaikan bahwa 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan BPK terkait Pajak Kesenian dan Hiburan harus ada pemisahan objek pajak karena terdapat beberapa layanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Terhadap hal tersebut, bagaimana perlakuan dari Disnaker PMPTSP terhadap penerbitan dari izin objek pajak tersebut, karena akan berdampak pada jenis pajak yang akan dipungut. Sebagai contoh: Wajib Pajak Karaoke, yang di dalamnya terdapat layanan makan dan/atau minum. Bagaimana izin yang dikeluarkan oleh Disnaker PMPTSP, dikarenakan tarif untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman sebesar 10%, sedangkan untuk tarif hiburan baik karaoke maupun club sebesar 50%.
9. Untuk kegiatan Monev selanjutnya, diharapkan PLN dapat memberikan data pelanggan PLN industri sebagai penguat Bapenda dalam menetapkan sebagai WP PBJT atas Tenaga Listrik non PLN.
10. Terkait PBJT atas Jasa Parkir, sesuai regulasi yang ada telah ada pembeda antara PBJT atas Jasa Parkir dengan Retribusi Parkir. Dan sebagaimana BAST yang telah ditandatangani antara Bapenda dan Dinas Perhubungan, ada beberapa titik parkir yang masih menjadi perdebatan antara pajak dan retribusi. Oleh karena itu perlu dilakukan diskusi dan penertiban bersama antara Bapenda dan Dinas Perhubungan terkait titik parkir, termasuk penertiban terhadap juru parkir liar di tempat-tempat bebas parkir, seperti Alfamart, Indomaret, dll.
11. Bahwa perlu adanya kolaborasi antara Bapenda, Disnaker PMPTSP dan Satpol PP terkait penertiban reklame. Sesuai TUSI, penertiban reklame menjadi kewenangan dari Satpol PP. Sedangkan Bapenda dan Disnaker PMPTSP sebagai *support* data, titik reklame mana yang harus dilakukan penertiban. Hal ini sesuai dengan TUSI Bapenda, bahwa pajak dipungut sesuai masa tayang, sedangkan Disnaker PMPTSP terkait izin pemasangan reklame.

- **Bagian Hukum**

1. Sebelum diundangkan Perda No. 4 Tahun 2023 dan Perwal No. 9 Tahun 2024, masing-masing perangkat daerah pemungut retribusi tidak memiliki dasar pemungutan, sehingga menggunakan Perwal tentang design karcis dari tahun 2009 – 2023. Dengan telah diundangkannya Perwal No. 9 Tahun 2024, diharapkan semua perangkat daerah pemungut retribusi untuk mencermati dan menyesuaikan tata cara pemungutan berdasarkan regulasi yang ada.
2. Memperhatikan proses penyusunan Perwal No. 9 Tahun 2024 di mana tidak semua perangkat daerah ikut berperan aktif, mengakibatkan saat diundangkannya Perwal No. 9 tahun 2024 beberapa perangkat daerah tidak memahami materi/ isinya.
3. Apabila Perwal No. 9 Tahun 2024 dirasa masih ada kekurangan, diharapkan perangkat daerah pemungut retribusi untuk melakukan reviu dan dikirim ke Bapenda selaku koordinator. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan harmonisasi bersama Bagian Hukum.
4. Untuk pelaksanaan PKS antara perangkat daerah pemungut retribusi dengan instansi/ pihak dari luar, hendaknya memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Perwal No. 9 Tahun 2024.
5. Dalam Perda No. 1 Tahun 2025 telah diatur jenis objek pajak dan retribusi yang harus dipungut, sehingga setelah diundangkan, perangkat daerah wajib untuk melakukan pemungutan. Apabila tidak dilakukan pemungutan maka akan menjadi temuan BPK karena dianggap merugikan negara.
6. Diharapkan dalam kegiatan Monev, pembahasan tidak saja tentang angka/nominal capaian, namun juga proses dan tahapan pemungutannya apakah sudah sesuai atau belum dengan regulasinya.
7. Bahwa pemungutan retribusi harus berdasarkan regulasi yang ada dan menggunakan media SKRD untuk penetapannya. Apabila SKRD belum dicetak maka bisa diketik secara manual dengan berdasarkan pada design yang tercantum dalam Perwal No. 9 Tahun 2024.

- **DPUPRKP**

1. Bahwa saat ini, dengan diundangkannya Perda No. 1 Tahun 2025, ada objek retribusi baru, dan sudah dilakukan pemungutan, namun belum dimasukkan dalam target dan belum tersedia SKRD sebagai sarana penetapan retribusi.

- **BKAD**

1. Terkait perangkat daerah yang telah melakukan pemungutan retribusi namun belum ada penetapan target, maka dalam penyusunan P-APBD 2025 bisa diusulkan untuk dimasukkan.

- **Perumda Tugu Tirta**

1. Bahwa target deviden sebesar 25 Miliar belum sesuai dengan Keputusan Kuasa Pemilik Modal untuk pembagian laba. Dan saat ini telah terkirim surat permohonan perubahan target deviden kepada Kuasa Pemilik Modal.
2. Terdapat titipan retribusi sampah pada rekening tagiahn air yang nilainya cukup besar sehingga memberatkan pelanggan, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap titipan retribusi sampah.

- **PLN UP3 Malang**

1. Melihat target PBJT atas Tenaga Listrik yang dibedakan antara PBJT dari PLN dan PBJT yang dihasilkan sendiri (Genset), realisasi sampai dengan TW. II khusus untuk PLN lebih dari 50%, sedangkan target PBJT yang dihasilkan sendiri kurang dari 50%.

2. Bahwa sejatinya potensi untuk mencapai target cukup besar, hal ini dikarenakan setiap industri/ bisnis dengan kategori Listrik Tegangan Menengah dengan daya lebih dari 200 KVA pasti memiliki genset.
3. Terkait informasi ke pelanggan-pelanggan industri (pabrik) dan bisnis (hotel, mall, dll) dapat disampaikan melalui bagian Engineering agar memberi informasi genset pelanggan.
4. Dengan adanya program diskon 50% di awal tahun 2025, terkait target tidak ada perubahan.
5. Disampaikan pula beberapa OPD memiliki tunggakan listrik dan terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan, di antaranya yang mengalami keterlambatan tahun 2025 yaitu DLH dan DPUPRPKP, sedangkan yang memiliki tunggakan di tahun 2024 antara lain Disporapar, Diskoperindag, DPUPRPKP, dan DLH. Untuk kode golongan III yaitu Pemerintah Daerah, untuk keterlambatan pembayaran tagihan tidak ada sanksi/ denda dan tagihan PLN disampaikan ke OPD maksimal tanggal 5 setiap bulannya. Oleh karena itu mohon kepada perangkat daerah untuk melakukan pembayaran tepat waktu.

- **UPT PPD Malang Kota (Samsat)**

1. Perihal Aplikasi Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana disampaikan saat rakor bersama Bapenda se Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, sudah dapat dimanfaatkan oleh Bapenda. Namun untuk teknis pelaksanaannya dibutuhkan diskusi lebih lanjut antara Bapenda dan Samsat.

- **Disnaker PMPTSP**

1. Terkait ketentuan perizinan untuk hiburan menjadi kewenangan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Exparsosbud.

- **Satpol PP**

1. Data penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP akan segera diserahkan kepada Bapenda setelah dilakukan koordinasi dengan pimpinan.
2. Di bidang Pembinaan dan Pengawasan, dalam pelaksanaan tugas pendataan mulai dari PPUD sampai dengan tipiring lebih pada pemeriksaan terkait izin reklame bukan pada pembayaran pajak reklame. Namun saat dilakukan pemeriksaan selain izin pemasangan reklame juga dipertanyakan terkait pembayaran pajak reklame.
3. Terkait pembongkaran reklame, sebelum dilakukan eksekusi sesuai dengan SOP yang ada akan dilakukan penelitian pemilik reklame untuk diberikan surat panggilan dengan materi apakah reklame tersebut akan dieksekusi oleh pemilik atau oleh Satpol PP. Apabila pemilik tidak ditemukan akan bekerja sama dengan Disnaker PMPTSP. Jika tetap ditemukan, maka eksekusi akan dilakukan oleh Satpol PP sesuai SOP.

- **Perumda TUNAS**

1. Tidak adanya proyek yang bisa dikerjakan, yang mana proyek merupakan salah satu pendapatan Perumda Tunas yang bisa menopang PAD. Dan saat ini Perumda Tunas hanya mengandalkan bisnis regular yang mana margin dan biaya operasional yang tidak sebanding.

2. Perumda Tunas sedang mencari peluang bisnis yang dapat menunjang peningkatan PAD dengan mengoptimalkan SDM dan biaya operasional.

Dari hasil monitoring dan evaluasi Badan Pendapatan Kota Malang, maka dapat kami simpulkan bahwa untuk realisasi PAD Kota Malang sampai dengan Triwulan II TA. 2025 telah tercapai sebesar Rp 497.680.376.899,95 atau sekitar 48,06% dari total target sebesar Rp 1.035.487.712.329,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PAD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PAJAK DAERAH	846.060.000.000,00	410.041.651.568,81	48,46%
2	RETRIBUSI DAERAH	72.648.518.750,00	26.939.957.406,00	37,08%
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	33.006.353.579,00	1.083.454.210,00	3,28%
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	83.772.840.000,00	59.615.313.715,14	71,16%
	TOTAL	1.035.487.712.329,00	497.680.376.899,95	48,06%

Dari hasil capaian PAD sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 497.680.376.899,95 apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan capaian sebesar Rp 402.066.134.662,06 maka ada kenaikan sebesar Rp 95.614.242.237,89 atau sekitar 23,788%. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, capaian tahun 2025 masih belum mencapai 50% dari target yang ditetapkan, terutama dari sektor retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang masih jauh capaiannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya meeningkatkan PAD antara lain meningkatkan system digitalisasi pajak dan retribusi, adanya komitmen Pemda dalam optimalisasi pajak dan retribusi, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, peningkatan proses penagihan piutang pajak dan retribusi, dan dukungan regulasi yang lebih kuat. Dengan memaksimalkan beberapa hal di atas, termasuk upaya integrasi data dan sinergitas antar perangkat daerah diharapkan target PAD yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Dr. HANDI PRIYANTO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760607 199412 1 001

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : DUSI HERAWATI, SE, MSA
NIP : 19821214 200901 2 008
JABATAN : Kasubbag Keuangan
OPD : Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan
KENDALA :

1. -

2.

3.

4.

SOLUSI :

1. -

2.

3.

4.

Malang,


(.....DUSI HERAWATI.....)

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : RUDI HARTONO, A.Mk
NIP : 19710816 200112 1 003
JABATAN : Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
OPD : DINAS KESEHATAN

KENDALA:

1. Pelanggan Laboratorium Kesehatan Lingkungan belum ada peningkatan yang signifikan.
2. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan Laboratorium masih terbatas.
3. Keterbatasan sarana untuk peningkatan Layanan Laboratorium baik Lingkungan maupun Klinik

SOLUSI:

1. Update promosi tentang pelayanan di UPT Labkesda melalui Instagram.
2. Pengajuan tambahan anggaran.
3. Pengajuan alat laboratorium lewat program Inpuls (Indonesia Public Healty Laboratory System Strengthening) dari Kementrian Kesehatan RI.

Matang 16 Juli 2025

Rudi Hartono, A.Mk

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : NUR RUDIARSO, SE.MTI.
NIP : 19690901 199602 1 002.
JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (JABFUNG)
OPD : DISPORAPAR
KENDALA : TIDAK ADA.

1. -

2. -

3. -

4. -

SOLUSI :

1. -

2. -

3. -

4. -

Malang, 16-07-2025


(NUR RUDIARSO)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : QORIK AINURROSA

NIP : 20010115 2023022003

JABATAN : Verifikator Keuangan

OPD : BKHP

KENDALA :

1. masih terdapat SKPD yang melakukan penginputan ^{pendapatan} STPD RI berbeda dengan sebelum yang masuk ke RKUP
2. masih terdapat pendapatan yang 'sukit' & diidentifikasi
- 3.
- 4.

SOLUSI :

1. Proses Rekonstruksi agar dilakukan pengecekan dengan Rekening Pioran
2. koordinasi dengan Bank Jatim dan SKPD
- 3.
- 4.

Malang, 16 Juli 2025


(.....QORIK.....)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1/ 002 /35.73.504/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIBUNAL II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : ANDREE GALIH PRASETYO
NIP : 20000326 202302 1 002
JABATAN : BENDAHARA PENERIMAAN BKAD
OPD : BKAD

KENDALA :

1. Turunnya perubahan atas perda sebelumnya sehingga banyak WR yang belum mengetahui,
2. Keterbatasan tenaga penyampaian tagihan/pemberitahuan retribusi,
3. Belum ada data NJOP terbaru.

SOLUSI :

1. Pemberitahuan pembayaran retribusi masih bergantung/menitipkan pada warga yang kenal dan pemberitahuan di kantor,
2. Pembayaran retribusi masih bergantung pada wajib retribusi yang membawa SPPT PBB.

Malang, 16 Juli 2025



ANDREE GALIH PRASETYO

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : Dwi Suprpti, SM
NIP : 19680208 198903 2 007
JABATAN : Analis Keuangan pusat dan Daerah Muda
OPD : Duplek PKP
KENDALA :

1. Untuk Retribusi yang ada target yaitu pada Ret. Pemakaian Lab. dan Ret. Alat berat. tidak ada kendala.
2. U, Retribusi penyedotan feses dan Retribusi pengolahan limbah cair belum ada target, menurut perda No. 1 th. 2025 diwajibkan untuk dilakukan pemungutan Retribusi, karena perda sudah di sahkan.
- 4.

SOLUSI :

1. Sudah melebihi target Tribulanan
2. Dilakukan pemungutan sesuai aturan karena perda sudah di sahkan. dengan menggunakan SKRD / sesuai ketentuan.
3. - meng ubulkan target Retribusi pada PAF th. 2025.
- 4.

Malang, 16 Juli 2025


(Dwi Suprpti, SM)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : HADIONO
NIP : 19700422 199303 1007
JABATAN : Bend Penerimaan
OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
KENDALA :

1.

2.

3.

4.

SOLUSI :

1. Melakukan Sosialisasi forum mineral untuk meningkatkan penerimaan retaksi.

2.

3.

4.

Malang, 16-7-2025


(Hadiono)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : Azhar Arranir ie
NIP : 19760207 201407 1001
JABATAN : Bendahara Penerimaan
OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KENDALA :

1.

2.

3.

4.

NIHIL

SOLUSI :

1.

2.

3.

4.

NIHIL

Malang 16 Juli 2025


(Azhar Arranir ie)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : JAGAN H

NIP :

JABATAN : 1381 Y120

OPD : DSHD Kota Malang

KENDALA :

1. Reformasi pelayanan terkait imbal jasa dan jukur
pembagian.

2.

3.

4.

SOLUSI :

1. Masukan proff regulasi RAPORDA pengelolaan parkir
dimasukan imbal jasa pembagian

2.

3.

4.

Malang,


(J. Jagan H)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

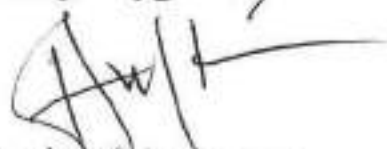
NAMA : Hadi Cahyono
NIP : 1980012020100 100 1
JABATAN : Bendahara Penerimaan
OPD : Disnaker PMPTSP
KENDALA :

1. Untuk Retribusi PBB.
- Wajib Retribusi Tidak ada Batas waktu untuk pembayaran
2. Retribusi dan
3. Retribusi TKA. Terkendala / tergantung kontrak kerja tenaga asing, tenaga kerja asing kontrak 1. Tahun untuk Retribusi dipropensi. dan untuk perpanjangan kontrak di atas satu Tahun baru masuk ke kas Daerah Kotamadya
- 4.

SOLUSI :

1. Untuk ~~PBB~~ Retribusi PBB
Untuk Wajib Retribusi Untuk dikasih Batas Waktu
2. Pembayaran wajib Retribusinya
- 3.
- 4.

Malang, 16-07-2025


Hadi Cahyono,

LAMPIRAN SURAT

Nomer : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : Fio Purwanto Kusumo, SH.
NIP : 1981120 198903 1 013.
JABATAN : Kasi Binsur
OPD : Satpol PP.
KENDALA :

1.

2.

3.

4.

SOLUSI :

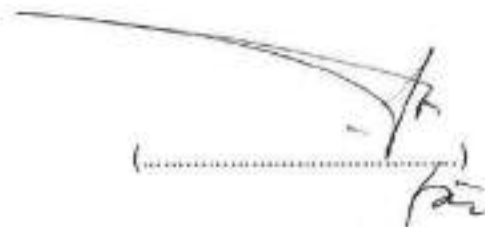
1.

2.

3.

4.

Malang, 16 Juli 2025.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp has a dotted line border and contains some illegible text. The signature appears to be 'Fio'.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : RAMDHANI ADHY
NIP : 199303082015091001
JABATAN :
OPD : BAPENDA KOTA MALANG

KENDALA :

1. Perwal 8 tahun 2024 → Penerapan penertiban reklame di kelor jalan A dan B → kelas Jalan Citinung ada 2 → diperubahan Perwal mohon diseshaikan
2. Penertiban atar Reklame Oleh fatpol mohon kami diberi pengantar atar reklame → per ruas jalan yang ditertibkan (Pembentahan ke Bapenda).
3. Apakah bisa dinas terkait memberikan ke bapenda perihal fasim yang diserahkan / dismanfaatkan. (aset dr pemkot maupun penyerahan dari pelaku usaha).
- 4.

SOLUSI :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Malang,


(.....)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : WAHYU SATRIA N
NIP : 1984 0609 200901 1004
JABATAN : PEMBELAJAR RETRIBUSI DAERAH
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kota Malang
KENDALA :

1. Adanya review PKS antara DLH dengan Pemula Tugu Tirta sehingga menghambat pelaksanaan perpanjangan PKS tersebut dimana masa berlaku PKS yang ada berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025. Apabila tidak bisa diperpanjang PKS tersebut, maka potensi PAD dari retribusi pelayanan kebersihan akan hilang 90% karena potensi terbesar ada pada penerimaan retribusi kebersihan yang dipungut dari Pemula Tugu Tirta.
2. Untuk proses kerjasama menunggu keputusan dan pimpinan / KPM dengan diterbitkan keputusan penugutan pihak ketiga.

SOLUSI :

1. Begenda sebagai koordinator, diharapkan dapat menכתבו untuk rekomendasi kepada Bapak Walikota / Bapak Kepala untuk segera membuat surat keputusan penugutan pihak ketiga (pemula tugu Tirta) sebagai mitra.
2. DLH dalam penugutan retribusi kebersihan kepada pelanggannya dengan melihat kebijakan efisiensi dan efektivitas.

Malang, 16 Juli 2025


(WAHYU SATRIA N.)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : IWAN SETYO BUDI S.Sos
NIP : 19720422 200801 1006
JABATAN :
OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
KENDALA :

1. Data piutang berubah ketika cut off data untuk piutang.
2. Ketika double ketetapan untuk (GA) data tidak dibatalkan otomatis
- 3.
- 4.

SOLUSI :

1. Dibuatkan histori jika ada perubahan ketetapan
2. Double penetapan (GA) dihapus / batal otomatis dari sistem.
- 3.
- 4.

Malang, 16 Juli 2025



(IWAN SETYO BUDI S.Sos)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : Soffi Andri Ana

NIP :

JABATAN : Aseman Perencanaan & Analisa Keuangan

OPD : Petumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang

KENDALA :

1. Target dividen sebesar Rp25 M belum sesuai dengan SK Kuasa Pemilik Modal
% pembagian laba.
2. Terdapat titipan retribusi sampah pada rekening tagihan air yang nilainya cukup besar sehingga memberatkan pelanggan.
- 3.
- 4.

SOLUSI :

1. Telah mengirimkan surat permohonan perubahan target dividen ke Kuasa Pemilik Modal.
2. Peninjauan kembali tentang titipan retribusi sampah.
- 3.
- 4.

Malang, 16 Juli 2025



(Soffi Andri Ana)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : Linda Dwi S / Indah Sari P.

NIP : 86090063 / 87090183

JABATAN : Priority Account Executive

OPD : PLN UP3 Malang

KENDALA :

1. Melihat target PBJT atas Tenaga Listrik yg dibedakan antara PBJT dari PLN & PBJT yg dihasilkan sendiri (Genset), Realisasi s/d triwulan II untuk PLN sudah di atas 50% . Sedangkan PBJT yg dihasilkan sendiri kurang dari 50%.
Padahal potensi untuk mencapai target itu besar, dikarenakan setiap Industri / Bisnis dengan kategori listrik Tegangan Menengah pasti memiliki genset .
2. Bisa menggali informasi ke pelanggan Industri (pabrik) dan Bisnis (Hotel, Mall, dll) untuk menyampaikan dan bagian Engineering mereka agar memberi info genset pelanggan .

SOLUSI :

1. Menggali informasi ke pelanggan Industri (pabrik) dan Bisnis (Mall, Hotel, dll) untuk menyampaikan dan bagian Engineering mereka agar
2. memberi info genset pelanggan .

3.

4.

Malang, 16 Juli 2025 .


Indah Sari P.
(.....)

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 900.1.13.1 / 1431 / 35.73.504 / 2025

Tanggal : 10 Juli 2025

LAMPIRAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PAD
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA : Maika Veronica A.

NIP : -

JABATAN : Bendahara

OPD : Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang.

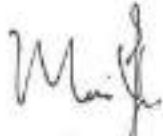
KENDALA :

1. Tidak Adanya proyek yang bisa dikerjakan, yang mana proyek merupakan salah satu pendapatan Perumda Tunas yang bisa menopang pendapatan. Saat ini hanya mengandalkan bisnis regular yg mana margin dan biaya operasional tdk sebanding.
- 2.
- 3.
- 4.

SOLUSI :

1. Mencari peluang bisnis yang dapat menunjang peningkatan pendapatan.
2. Mengoptimalkan SDM ~~dan~~ ^{dan} biaya operasional
- 3.
- 4.

Malang, 16 Juli 2025


(Maika Veronica A., SE.)



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.bapenda.malangkota.go.id | email : bapenda@malangkota.go.id
Malang 65132



Malang, 9 Juli 2025

Nomor : 900.1.13.1/1424/35.73.504/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Laporan Realisasi Penerimaan PAD
Bulan Juni 2025**

Kepada
Yth. Bapak **Walikota Malang**
di-

MALANG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat **Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Tahun Anggaran 2025** sampai dengan Bulan Juni 2025 , sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



Dr. HANDI PRIYANTO, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760607 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Sekretaris Daerah Kota Malang
2. Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kota Malang
3. Yth. Sdr. Kepala BKAD Kota Malang

REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI PENERIMAAN			%	KETERANGAN
			JUNI 2025 Rp.	S/D BULAN LALU Rp.	S/D JUNI 2025 Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PAJAK DAERAH	846,060,000,000.00	73,985,999,863.65	336,055,651,705.16	410,041,651,568.81	48.46	
2	RETRIBUSI DAERAH	72,648,518,750.00	4,814,695,546.00	22,125,261,860.00	26,939,957,406.00	37.08	
3	PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	33,006,353,579.00	-	1,083,454,210.00	1,083,454,210.00	3.28	
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	83,772,840,000.00	10,609,571,378.55	49,005,742,336.59	59,615,313,715.14	71.16	
	JUMLAH	1,035,487,712,329.00	89,410,266,788.20	408,270,110,111.75	497,680,376,899.95	48.06	

Malang, 9 Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Dr. HANDI PRIYANTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2025 S/D JUNI 2025

KODE REKENING	URAIAN	REALISASI PENERIMAAN				KURANG/(LEBIH)	% S/D BULAN
		ANGGARAN TAHUN 2025	S/D BULAN LALU Rp.	JUNI 2025 Rp.	S/D JUNI 2025 Rp.		
1	1	3	4	5	6	7	8
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,035,487,712,329.00	408,270,110,111.75	89,410,266,788.70	497,680,376,899.95	537,807,335,429.05	48.06%
4 1 01	HASIL PAJAK DAERAH	846,060,000,000.00	336,055,651,705.16	73,985,999,863.65	410,041,651,568.81	436,018,948,431.19	48.46%
4 1 01 19 03	PBB JASA PERHOTELAN	56,000,000,000.00	21,312,150,099.00	4,428,209,396.00	25,746,060,095.00	30,252,035,905.00	45.90%
4 1 01 19 03 0001	PBB Hotel	53,385,000,000.00	19,683,753,311.00	4,044,441,109.00	23,728,194,520.00	29,656,805,480.00	44.45%
4 1 01 19 03 0007	PBB Wisata Pariwisata	472,000,000.00	107,649,029.00	19,414,049.00	127,057,078.00	345,442,922.00	36.86%
4 1 01 19 03 0009	PBB Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalow/Resort/Cottage	2,142,500,000.00	1,520,753,759.00	364,354,738.00	1,881,706,407.00	256,791,593.00	88.01%
4 1 01 07	PBB JASA MAKANAN DAM/ATAU MINUMAN	163,404,476,287.00	73,797,607,697.00	15,029,408,593.00	88,826,215,690.00	74,584,260,597.00	54.36%
4 1 01 07 01	PBB Restoran	151,239,476,287.00	73,269,301,276.00	14,937,305,382.00	88,207,106,588.00	63,032,369,699.00	58.32%
4 1 01 07 01 0001	PBB Finesia Jasa Boga dan Katering	13,185,000,000.00	528,505,871.00	84,603,331.00	613,108,102.00	11,551,896,899.00	5.06%
4 1 01 07 02	PBB JASA KESEHATAN DAN HIBURAN	10,000,000,000.00	4,848,755,568.80	3,042,774,416.00	5,891,525,984.80	4,108,470,015.20	58.92%
4 1 01 08	PBB Taruhan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual lainnya yang Dipersembahkan secara langsung disuatu lokasi tertentu	3,576,900,000.00	2,230,034,060.00	457,480,564.00	2,688,514,624.00	879,985,375.10	75.40%
4 1 01 08 01	PBB Pengaliran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1,809,000,000.00	389,310,941.00	45,257,800.00	234,766,341.00	1,574,231,659.00	12.98%
4 1 01 08 02	PBB Pengaliran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	760,500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	760,000,000.00	0.07%
4 1 01 08 03	PBB Permainan	638,000,000.00	1,149,663,396.90	302,644,365.00	1,352,307,761.90	(734,307,761.90)	218.82%
4 1 01 08 04	PBB Permainan Kematangan	288,000,000.00	439,668,830.00	83,442,882.00	523,111,712.00	(235,111,712.00)	181.64%
4 1 01 08 05	PBB Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat khusus dan/atau Peralatan	1,411,500,000.00	839,007,406.00	72,407,586.00	401,594,992.00	1,009,905,008.00	28.45%
4 1 01 08 06	PBB Fasilitas Permainan dengan menggunakan tempat khusus dan/atau Peralatan	1,546,500,000.00	501,380,934.00	181,451,819.00	682,732,553.00	863,767,447.00	44.43%
4 1 01 08 07	PBB Panti Rajat dan Panti Refeksi	34,000,000,000.00	15,723,487,011.00	1,251,744,734.00	16,982,734,745.00	7,017,268,255.00	70.78%
4 1 01 08 07 0001	PBB Atletik, Karate, Judo, Judo, Bar, dan Mandi Uap/Spa	32,740,000,000.00	14,695,819,651.00	1,069,536,259.00	15,763,355,910.00	6,974,644,090.00	69.33%
4 1 01 08 07 0002	Pajak Rekreasi	1,156,000,000.00	910,799,040.00	189,308,475.00	1,100,107,515.00	54,892,485.00	95.25%
4 1 01 08 07 0003	Rekreasi Papan Berlubang/Bowling/Meluk/Meluk/Meluk	1,575,000.00	-	-	-	1,575,000.00	0.00%
4 1 01 08 07 0004	Rekreasi Kano	1,056,000.00	16,800,000.00	2,400,000.00	19,200,000.00	(18,144,000.00)	1828.57%
4 1 01 08 07 0005	Rekreasi Melekat/Sliver/Tracer	101,375,000.00	96,068,320.00	-	96,068,320.00	4,306,680.00	95.79%
4 1 01 08 07 0006	Rekreasi Seblatan	108,060,000,000.00	45,284,588,879.84	9,804,694,149.75	55,089,644,029.59	52,971,395,970.41	50.98%
4 1 01 08 07 0007	Rekreasi Berjalan	307,610,000,000.00	45,109,381,731.00	9,775,148,584.00	54,884,530,319.00	52,725,469,684.00	51.00%
4 1 01 08 07 0008	PBB TENAGA LISTRIK	450,000,000.00	175,208,147.84	28,505,565.73	204,113,713.29	245,886,286.41	45.36%
4 1 01 10 01	PBB Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumbat Lain	4,000,000,000.00	2,942,787,495.00	354,329,455.00	3,277,316,950.00	722,683,050.00	81.98%
4 1 01 10 02	PBB Konsumsi Tenaga Listrik yang diFasilitas Sendiri	4,000,000,000.00	2,942,787,495.00	354,329,455.00	3,277,316,950.00	722,683,050.00	81.98%
4 1 01 11	PBB JASA PARKIR	4,000,000,000.00	2,942,787,495.00	354,329,455.00	3,277,316,950.00	722,683,050.00	81.98%
4 1 01 11 01	PBB Jasa Parkir	3,500,000,000.00	1,469,361,766.70	213,533,890.00	1,682,896,456.70	1,817,104,543.30	48.08%
4 1 01 12	Pajak Air Tanah	3,500,000,000.00	1,469,361,766.70	213,533,890.00	1,682,896,456.70	1,817,104,543.30	48.08%
4 1 01 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0001	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0002	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0003	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0004	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0005	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0006	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0007	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0008	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0009	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0010	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0011	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0012	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0013	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0014	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0015	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0016	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0017	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0018	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0019	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0020	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0021	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0022	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0023	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0024	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0025	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0026	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0027	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0028	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0029	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0030	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0031	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0032	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0033	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0034	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0035	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0036	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0037	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0038	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0039	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0040	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0041	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0042	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0043	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,610,556.00	33,250,957,140.00	39,749,042,860.00	45.55%
4 1 01 15 01 0044	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	71,000,000,000.00	24,044,346,584.00	9,205,61			

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI PENERIMAAN			KURANG/(LEBIH)	% S/D BULAN
			S/D BULAN LALU Rp.	JUNI 2025 Rp.	3/0 JUNI 2025 Rp.		
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33,006,353,579.00	1,083,454,210.00	-	1,083,454,210.00	31,922,899,369.00	3.28%
4 1 03 02 01	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7,215,251,581.00	1,083,454,210.00	-	1,083,454,210.00	6,131,797,351.00	15.02%
4 1 03 02 01 0001	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Jatiw	7,215,251,581.00	-	-	-	7,215,251,581.00	0.00%
4 1 03 02 01 0002	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tugu Artha Sejahtera	-	1,083,454,210.00	-	1,083,454,210.00	1,083,454,210.00	0.00%
4 1 03 02 02	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	791,102,018.00	-	-	-	791,102,018.00	0.00%
4 1 03 02 02 0001	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	791,102,018.00	-	-	-	791,102,018.00	0.00%
4 1 03 02 03	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25,000,090,000.00	-	-	-	25,000,000,000.00	0.00%
4 1 03 02 03 0001	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25,000,090,000.00	-	-	-	25,000,000,000.00	0.00%
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83,772,840,000.00	49,005,742,336.59	10,609,571,378.55	59,615,313,715.14	24,157,526,286.86	71.15%
4 1 04 01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	1,065,808,000.00	-	1,065,808,000.00	(65,808,000.00)	73.31%
4 1 04 03 01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	19,450,000,000.00	10,230,794,066.00	4,028,523,300.00	14,259,317,366.00	5,190,682,634.00	76.06%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	15,450,000,000.00	8,092,638,079.00	3,658,018,300.00	11,750,656,379.00	3,699,343,621.00	76.06%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	15,450,000,000.00	8,092,638,079.00	3,658,018,300.00	11,750,656,379.00	3,699,343,621.00	76.06%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	2,138,155,987.00	370,505,000.00	2,508,660,987.00	1,491,339,013.00	62.72%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	2,138,155,987.00	370,505,000.00	2,508,660,987.00	1,491,339,013.00	62.72%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	1,072,635,990.00	207,424,000.00	1,280,059,990.00	1,280,059,990.00	28.25%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	1,002,080,872.58	128,032,344.49	1,130,113,217.07	2,865,886,782.93	28.25%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	1,002,080,872.58	128,032,344.49	1,130,113,217.07	2,865,886,782.93	28.25%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	895,551,474.31	118,554,757.40	1,014,106,231.71	2,981,893,768.29	25.45%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	102,519,398.27	9,477,587.09	111,996,985.36	(111,996,985.36)	-
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	102,519,398.27	9,477,587.09	111,996,985.36	(111,996,985.36)	-
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	1,400,000.00	1,750,000.00	3,150,000.00	(3,150,000.00)	-
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	1,537,899,790.96	277,381,043.00	1,795,240,753.96	(1,795,240,753.96)	-
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	116,085,588.41	52,990,554.24	149,056,142.65	(149,056,142.65)	-
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	13,225,057,117.07	977,544,583.43	14,202,601,700.50	(14,202,601,700.50)	-
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	20,730,074,044.85	4,924,924,322.53	25,655,000,367.38	33,515,730,655.62	41.38%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	30,730,074,044.85	4,924,924,322.53	25,655,000,367.38	33,515,730,655.62	41.38%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	35,513,136.12	9,441,730.86	44,954,866.98	107,146,120.02	29.56%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	35,513,136.12	9,441,730.86	44,954,866.98	107,146,120.02	29.56%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	4,000,000,000.00	8,472,890.00	1,545,590.00	10,018,480.00	(10,018,480.00)	-

Malang, 9 Juli 2025

KEPALA BADAN PENBAPTAN DAERAH



Dr. HANDE PRYANTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760807 199412 1 002

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI PENERIMAAN Rp.	KURANG/LEBIH	% S/D BILAN
1	2	3	4	5	6
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,035,487,712,329.00	497,680,376,899.95	537,807,335,429.05	48.06%
4 1 01	HASIL PAJAK DAERAH	846,060,000,000.00	410,041,651,568.81	436,018,348,431.19	48.46%
4 1 01 00	RENTAN JASA PERHOTELAN	56,000,000,000.00	25,740,860,095.00	30,259,039,905.00	45.97%
4 1 01 00 0001	RENTAN Hotel	53,880,000,000.00	23,728,194,520.00	29,958,805,480.00	44.42%
4 1 01 00 0007	RENTAN Wisata Pariwisata	470,500,000.00	127,657,078.00	345,442,922.00	26.89%
4 1 01 00 0009	RENTAN Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalow/Resort/Cottage	2,142,500,000.00	1,885,708,497.00	256,791,503.00	88.02%
4 1 01 01	RENTAN JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	163,404,476,287.00	88,820,215,680.00	74,584,260,597.00	54.38%
4 1 01 01 01	RENTAN Restoran	151,235,476,287.00	88,207,106,388.00	63,027,369,899.00	58.32%
4 1 01 01 02	RENTAN Penjualan Jajanan dan Katering	12,169,000,000.00	610,109,302.00	11,558,890,698.00	5.04%
4 1 01 02	RENTAN JASA KESENIAN DAN HIBURAN	10,000,000,000.00	5,891,529,584.80	4,108,470,415.20	58.92%
4 1 01 02 01	RENTAN Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual lainnya yang Diperlihatkan secara langsung di suatu lokasi tertentu	3,576,500,000.00	1,996,314,624.90	2,079,185,375.10	55.82%
4 1 01 02 02	RENTAN Pengaliran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Budaya	1,800,000,000.00	134,788,843.00	1,665,211,157.00	12.98%
4 1 01 02 03	RENTAN Permainan	760,500,000.00	500,000.00	759,500,000.00	0.07%
4 1 01 02 04	RENTAN Permainan Kelengkapan	618,000,000.00	1,352,307,761.90	(734,307,761.90)	218.82%
4 1 01 02 05	RENTAN Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau Perlengkapan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebutuhan	288,000,000.00	528,111,712.00	(239,111,712.00)	183.64%
4 1 01 02 06	RENTAN Panti Njai dan Panti Balok	1,411,500,000.00	401,394,592.00	1,009,505,408.00	28.42%
4 1 01 02 07	RENTAN Diskon, Korabe, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/SPA	1,536,500,000.00	582,752,553.00	953,747,447.00	38.29%
4 1 01 03	PAJAK NEGARA	24,080,000,000.00	18,782,731,745.80	5,297,268,254.20	77.78%
4 1 01 03 01	Reklame Papan/Billboard/Muka/Videootron/Megatron	12,740,000,000.00	15,768,158,810.00	6,974,644,000.00	69.38%
4 1 01 03 02	Reklame Lain	1,155,000,000.00	1,100,107,315.00	54,892,685.00	95.25%
4 1 01 03 03	Reklame Melakat/Stiker/Poster	1,575,000.00	-	1,575,000.00	0.00%
4 1 01 03 04	Reklame Selebaran	1,000,000.00	19,100,000.00	(18,100,000.00)	1828.57%
4 1 01 03 05	Reklame Berjalan	102,375,000.00	98,088,320.00	4,286,680.00	95.79%
4 1 01 04	RENTAN TENAGA LISTRIK	108,060,000,000.00	55,088,444,029.50	52,971,555,970.50	50.98%
4 1 01 04 01	RENTAN Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber lain	107,610,000,000.00	54,384,330,318.00	53,225,669,682.00	50.50%
4 1 01 04 02	RENTAN Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri	450,000,000.00	204,113,713.50	245,886,286.50	45.36%
4 1 01 05	RENTAN JASA PARKIR	4,000,000,000.00	3,177,316,950.00	722,683,050.00	79.43%
4 1 01 05 01	RENTAN Jasa Parkir	4,000,000,000.00	3,177,316,950.00	722,683,050.00	79.43%
4 1 01 06	PAJAK AIR TANAH	3,500,000,000.00	1,682,895,456.70	1,817,104,543.30	48.08%
4 1 01 06 01	PAJAK Air Tanah	3,500,000,000.00	1,682,895,456.70	1,817,104,543.30	48.08%
4 1 01 07	PAJAK BUMI dan Bangunan Perumahan (PBB)	73,000,000,000.00	33,250,157,140.00	39,749,842,860.00	45.56%
4 1 01 07 01	PAJAK Bumi dan Bangunan Perumahan (PBB)	73,000,000,000.00	33,250,157,140.00	39,749,842,860.00	45.56%
4 1 01 08	PAJAK Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	220,000,000,000.00	92,956,170,827.72	127,043,829,172.28	42.25%
4 1 01 08 01	PAJAK Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	220,000,000,000.00	92,956,170,827.72	127,043,829,172.28	42.25%
4 1 02 00	OPSIEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	126,293,996,800.00	59,858,628,790.00	66,440,373,150.00	47.39%
4 1 02 00 01	OPSIEN PKB	126,293,996,800.00	59,858,628,790.00	66,440,373,150.00	47.39%
4 1 02 01	OPSIEN BTA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBKNB)	57,801,516,810.00	26,496,605,900.00	31,304,910,910.00	45.84%
4 1 02 01 01	OPSIEN BBKNB	57,801,516,810.00	26,496,605,900.00	31,304,910,910.00	45.84%
4 1 02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	72,648,518,750.00	26,939,957,406.00	45,708,561,344.00	37.08%
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	47,446,018,750.00	19,349,226,351.00	28,096,792,399.00	40.78%
4 1 02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	434,018,750.00	159,000,000.00	275,018,750.00	36.63%
4 1 02 01 01 0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan	434,018,750.00	159,000,000.00	275,018,750.00	36.63%
4 1 02 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	21,000,000,000.00	12,542,007,000.00	8,457,993,000.00	59.72%
4 1 02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	21,000,000,000.00	12,542,007,000.00	8,457,993,000.00	59.72%
4 1 02 01 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	17,000,000,000.00	2,772,908,351.00	14,227,091,649.00	16.31%
4 1 02 01 04 0001	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	17,000,000,000.00	2,772,908,351.00	14,227,091,649.00	16.31%
4 1 02 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	9,000,000,000.00	3,885,311,000.00	5,114,689,000.00	43.17%
4 1 02 01 05 0001	Retribusi Pelayanan	2,160,000,000.00	841,217,000.00	1,318,783,000.00	38.93%
4 1 02 01 05 0002	Retribusi Los	3,600,000,000.00	1,682,893,000.00	1,917,107,000.00	46.74%
4 1 02 01 05 0003	Retribusi Kios	3,240,000,000.00	1,371,401,000.00	1,868,599,000.00	42.34%
4 1 02 01 06	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Raks	12,000,000.00	10,800,000.00	1,200,000.00	90.00%
4 1 02 01 06 0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyediaan Raks (DUI)	12,000,000.00	10,800,000.00	1,200,000.00	90.00%
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	9,202,500,000.00	4,267,110,058.00	4,935,389,942.00	46.26%
4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,050,000,000.00	1,163,681,975.00	456,418,025.00	72.34%
4 1 02 02 01 0002	Retribusi Penyewaan Tanah (BRAD)	1,000,000,000.00	1,085,731,525.00	424,238,475.00	72.39%
4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan (DIBUD)	50,000,000.00	84,000,000.00	(34,000,000.00)	128.00%
4 1 02 02 01 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium (DPLP PERKUM)	25,000,000.00	8,750,000.00	16,250,000.00	35.00%
4 1 02 02 01 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium (DUI)	-	8,375,450.00	(8,375,450.00)	-
4 1 02 02 01 0007	Retribusi Pemakaian Alat (DPLP PERKUM)	75,000,000.00	25,525,000.00	49,475,000.00	34.03%
4 1 02 02 02	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6,500,000,000.00	2,598,351,683.00	3,901,648,317.00	39.97%
4 1 02 02 02 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	6,500,000,000.00	2,598,351,683.00	3,901,648,317.00	39.97%
4 1 02 02 03	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1,800,000,000.00	442,309,000.00	1,357,691,000.00	24.58%
4 1 02 02 03 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Fasilitas dan Olahraga	1,000,000,000.00	442,309,000.00	557,691,000.00	44.23%
4 1 02 02 04	Retribusi Perijinan Produk Usaha Daerah	52,500,000.00	32,567,400.00	19,932,600.00	62.03%
4 1 02 02 04 0003	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Biji atau Benih lain	52,500,000.00	32,567,400.00	19,932,600.00	62.03%
4 1 02 03	Retribusi Perlakuan Tertentu	16,000,000,000.00	3,323,620,997.00	12,676,379,003.00	20.77%
4 1 02 03 07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	15,000,000,000.00	3,031,017,997.00	11,968,982,003.00	20.21%
4 1 02 03 07 0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	15,000,000,000.00	3,031,017,997.00	11,968,982,003.00	20.21%
4 1 02 03 08	Retribusi Pemakaian Tenaga Kerja Asing	1,000,000,000.00	292,603,000.00	707,397,000.00	-
4 1 02 03 08 0001	Retribusi Pemakaian Tenaga Kerja Asing	1,000,000,000.00	292,603,000.00	707,397,000.00	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI PENERIMAAN Rp.	KURANG/(LEBIH)	%S/D BULAN
1	2	3	4	5	6
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33,006,353,579.00	1,083,454,210.00	31,922,899,369.00	3.28%
4 1 03 02 01	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7,215,251,561.00	1,983,454,210.00	5,231,797,351.00	25.02%
4 1 03 02 01 0001	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Jatim	7,215,251,561.00	-	7,215,251,561.00	0.00%
4 1 03 02 01 0002	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Tugu Artha Sejahtera	-	1,083,454,210.00	(1,083,454,210.00)	-
4 1 03 02 02	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	791,102,018.00	-	791,102,018.00	0.00%
4 1 03 02 02 0001	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	791,102,018.00	-	791,102,018.00	0.00%
4 1 03 02 03	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Beling Air Minum)	25,000,000,000.00	-	25,000,000,000.00	0.00%
4 1 03 02 03 0001	Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Beling Air Minum)	25,000,000,000.00	-	25,000,000,000.00	0.00%
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83,772,840,000.00	59,615,313,715.34	24,157,526,284.66	71.16%
4 1 04 01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,000,000,000.00	1,045,808,000.00	(45,808,000.00)	-
4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	19,450,000,000.00	14,255,317,366.00	5,194,682,634.00	73.31%
4 1 04 03 01	Hasil Sewa BMD	15,450,000,000.00	11,750,056,379.00	3,699,943,621.00	76.06%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	15,450,000,000.00	11,750,056,379.00	3,699,943,621.00	76.06%
4 1 04 03 01	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4,000,000,000.00	2,506,660,987.00	1,493,339,013.00	62.72%
4 1 04 03 01 0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4,000,000,000.00	2,506,660,987.00	1,493,339,013.00	62.72%
4 1 04 03 03 0002	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	1,280,039,990.00	(1,280,039,990.00)	-
4 1 04 05	Penerimaan Jasa Giro	4,000,000,000.00	1,130,113,217.07	2,869,886,782.93	28.25%
4 1 04 05 01	Jasa Giro Kas pada Daerah	4,000,000,000.00	1,130,113,217.07	2,869,886,782.93	28.25%
4 1 04 05 01 0001	Jasa Giro Kas pada Daerah	4,000,000,000.00	1,018,116,231.71	2,981,883,768.29	25.45%
4 1 04 05 02 0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	111,996,985.36	(111,996,985.36)	-
4 1 04 07	Pendapatan Bangsa	-	-	-	-
4 1 04 11 01 0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
4 1 04 08 01 0001	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	3,150,000.00	(3,150,000.00)	-
4 1 04 12 01 0001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	1,795,240,753.00	(1,795,240,753.00)	-
4 1 04 14 01 0001	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	169,056,142.65	(169,056,142.65)	-
4 1 04 15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
4 1 04 25 03 0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	14,202,601,721.10	(14,202,601,721.10)	-
4 1 04 16	Pendapatan BLUD	59,170,759,023.00	25,655,008,367.38	33,515,750,655.62	43.36%
4 1 04 16 02 0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Iayanan	59,170,759,023.00	25,655,008,367.38	33,515,750,655.62	43.36%
4 1 04 16 06	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	152,100,977.00	44,954,856.98	107,146,120.02	-
4 1 04 21 06 0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	152,100,977.00	44,954,856.98	107,146,120.02	-
4 1 04 17 01 0001	Pendapatan Denda Pengalihan Sewa BMD	-	10,623,300.00	(10,623,300.00)	-

Melang, 9 Juli 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



Dr. HANDI PRYANTO, AP., MSI
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19760607 199412 1 002

LAPORAN PIUTANG RETRIBUSI PERIODE JUNI 2025

NO	OPD	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG		
			S/D BULAN LALU	S/D 30 JUNI	CAPAIAN PENAGIHAN PIUTANG
1	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Retribusi Tempat Berjualan	3,251,911,000.00	3,248,511,000.00	3,400,000.00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	162,058,500.00	161,995,500.00	63,000.00
3	Dinas Perhubungan	Retribusi Terminal MCK	37,041,200.00	37,041,200.00	0.00
		Retribusi Terminal Kios	1,550,800.00	1,550,800.00	0.00
		Retribusi Limbah IPLT	0.00	0.00	0.00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Penyedotan Kakus	0.00	0.00	0.00
		Retribusi Pemakaian Laboratorium	0.00	0.00	0.00
		Retribusi Pemakaian Alat Berat	0.00	0.00	0.00
5	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0.00	0.00	0.00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata		0.00	0.00	0.00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0.00	0.00	0.00

Malang, 9 Juli 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



Dr. HANDI PRIYANTO, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760607 199412 1 001